



Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik

ISSN (online): 2657-0092 | ISSN (print): 2301-4342 |

Website: <http://jakp.fisip.unand.ac.id> | Lisensi:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/> |

Email: jakpfisipunand@soc.unand.ac.id |

Implementasi Sistem Informasi Masjid (Simas) Kemenag Sebagai Instrumen Penguatan Good Governance dalam Pelayanan Masyarakat di Kabupaten Bogor

Muhammad Rudy Herliansyah^{1*}, Rita Rahmawati¹, Muhammad Luthfie¹

¹ Administrasi Publik, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia.

*Corresponding Author: herliansyahwisasta@gmail.com

Article Information

Submitted : 27 Februari 2025
Review : 14 Maret 2025
Accepted : 24 April 2025
Published : 30 April 2025

Keywords

Good governance,
implementasi, Sistem
Informasi Masjid.

Abstract-

This study explores the implementation of the Ministry of Religious Affairs' Mosque Information System (SIMAS) as a tool to strengthen good governance in mosque management within Bogor Regency. Despite increasing digitalization in public services, the application of such systems in religious institutions remains under-examined. This research addresses this gap by analyzing how SIMAS contributes to improving transparency, accountability, participation, responsiveness, and fairness in mosque governance. The study aims to describe the operationalization of SIMAS, identify factors that enable or hinder its success, and evaluate its effectiveness in supporting mosque administration. Using a qualitative approach, data were collected through interviews and direct observations to capture the perspectives of stakeholders involved in SIMAS implementation. Findings indicate that SIMAS positively influences governance by promoting more open, responsive, and participatory mosque management. These improvements are vital for aligning religious service delivery with broader good governance principles. The study also offers practical recommendations for the Ministry of Religious Affairs and mosque administrators to enhance system performance and public service outcomes. Theoretically, the research contributes to public administration literature by extending Van Meter and Van Horn's policy implementation model. It introduces three additional dimensions—sustainability, monitoring and evaluation, and innovation—which are crucial for understanding the long-term success of digital governance tools in religious and public institutions.

DOI : <https://doi.org/10.25077/jakp.10.1.182-198.2025>

PENDAHULUAN

Masjid dalam tradisi Islam memiliki fungsi multidimensional yang melampaui sekadar tempat ibadah. Sejak masa Rasulullah SAW, masjid—seperti Masjid Nabawi di Madinah—berperan sebagai pusat kehidupan sosial, pendidikan, dan politik umat Islam. Masjid menjadi wadah pengajaran agama, musyawarah, penyelesaian konflik, dan pengambilan keputusan administratif (Nasr, 2001). Selain itu, masjid berfungsi sebagai forum diskusi, penguatan ukhuwah Islamiyah, dan distribusi zakat (Satria, 2016). Para pemikir seperti Syed Muhammad Naquib Al-Attas (1980) dan Marshall Hodgson (1974) juga menekankan masjid sebagai ruang sosial yang inklusif dan pusat kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1. Fungsi Historis Masjid dalam Tradisi Islam

Aspek Peran Masjid	Kegiatan Utama	Contoh dari Sejarah Islam
Sosial	Pusat komunitas, solidaritas, dan distribusi zakat	Masjid Nabawi sebagai pusat distribusi zakat
Politik	Tempat musyawarah dan pengambilan keputusan strategis	Syura dalam pengambilan keputusan perang
Pendidikan	Tempat belajar agama dan ilmu pengetahuan umum	Pengajaran Al Qur'an oleh Rasulullah di Masjid

Namun, dalam konteks modern, pengelolaan masjid sering menghadapi tantangan serius. Masalah utama terletak pada kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana, yang menyebabkan menurunnya kepercayaan jamaah dan partisipasi publik (Putra & Murtini, 2024). Minimnya pelibatan jamaah dalam pengambilan keputusan menghasilkan kebijakan yang kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Imani, 2023). Kompleksitas kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), serta rendahnya literasi digital juga menjadi penghambat dalam tata kelola masjid yang efektif (Rahmawati et al., 2019).

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Kementerian Agama RI mengembangkan Sistem Informasi Masjid (SIMAS). SIMAS merupakan sistem berbasis web yang bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan masjid. Sistem ini menyajikan data masjid secara terintegrasi, menyediakan informasi kegiatan keagamaan, serta memfasilitasi publikasi laporan keuangan guna memperkuat kepercayaan publik (Wisudya et al., 2025).

Tabel 2. Fungsi Utama SIMAS

Fungsi	Keterangan	Manfaat bagi Pengelolaan Masjid
Data Terpadu	Mengintegrasikan data masjid seluruh Indonesia	Mempermudah pelaporan dan monitoring
Informasi Kegiatan	Penyebaran informasi jadwal shalat dan acara	Jamaah lebih mudah mengakses informasi
Transparansi Keuangan	Publikasi laporan penggunaan dana masjid	Meningkatkan kepercayaan jamaah

Meskipun SIMAS telah diimplementasikan, efektivitasnya dalam meningkatkan tata kelola masjid belum banyak dikaji, khususnya di tingkat lokal. Penelitian terkait sistem informasi manajemen umumnya lebih fokus pada sektor bisnis atau pemerintahan (Mulyani,2024) dan (Himmah,2024) , belum banyak yang meneliti penerapan SIMAS dalam konteks pengelolaan masjid. Belum ada kajian mendalam mengenai bagaimana SIMAS berperan dalam memperkuat prinsip good governance di masjid-masjid lokal seperti di Kabupaten Bogor Barat.

Penelitian ini menganalisis bagaimana SIMAS dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di masjid, mempermudah pengelolaan kegiatan dan data jamaah, serta mendukung transparansi dalam tata kelola masjid. Secara spesifik, penelitian ini akan mengkaji implementasi SIMAS dalam memperkuat good governance dalam pengelolaan masjid di Leuwiliang, Leuwisadeng, dan Jasinga, dalam konteks pemekaran Kabupaten Bogor Barat. Dengan banyaknya masjid dan pondok pesantren di wilayah tersebut, SIMAS diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik, sehingga memperkuat posisi masjid sebagai pusat pembangunan masyarakat dan tata kelola yang lebih baik. Penelitian ini juga mempertimbangkan tantangan implementasi SIMAS, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan tingkat literasi digital pengurus masjid, seperti yang terjadi di Kabupaten Bogor. Selain itu, akan dikaji potensi SIMAS dalam memperkuat peran masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan utama: Bagaimana implementasi SIMAS dapat memperkuat prinsip good governance dalam tata kelola masjid di Kabupaten Bogor? Pertanyaan ini dijabarkan ke dalam tiga fokus analisis:

- a. Mendeskripsikan implementasi SIMAS sebagai instrumen penguatan good governance dalam pelayanan publik masjid di Kabupaten Bogor;

- b. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan SIMAS;
- c. Mengevaluasi efektivitas SIMAS dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi jamaah

Untuk memahami bagaimana penerapan Sistem Informasi Masjid (SIMAS) dapat berkontribusi terhadap terwujudnya good governance dalam pengelolaan masjid. Kerangka konseptual penelitian mencakup empat aspek utama:

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi SIMAS sebagai kebijakan Kementerian Agama dianalisis menggunakan model Meter & Horn (1975) , yang mencakup standar kebijakan, sumber daya, komunikasi organisasi, serta faktor sosial, ekonomi, dan politik.

2. Indikator Implementasi SIMAS

Keberhasilan SIMAS diukur berdasarkan indikator good governance dari UNDP (1997) dan Grindle (1980) , termasuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efisiensi dan efektivitas layanan masjid.

3. Penguatan Good Governance

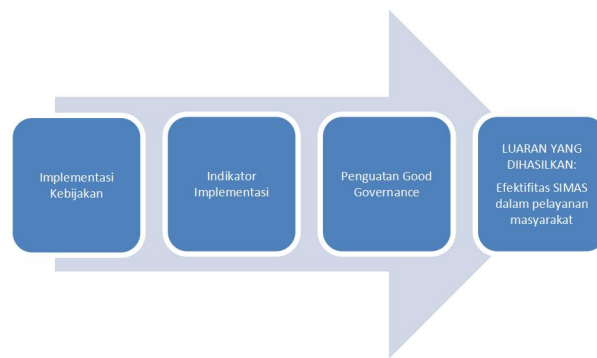
SIMAS diharapkan meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat kolaborasi antara Kemenag, pengurus masjid, dan masyarakat, serta membantu penyelesaian masalah sosial dalam tata kelola masjid. Pendekatan ini didukung oleh kajian OECD (2014) dan penelitian Karimah & Baehaqi (2022).

4. Luaran Penelitian

Penelitian ini menghasilkan evaluasi efektivitas SIMAS dalam pengelolaan masjid serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan implementasinya. Analisis dilakukan dengan mengadopsi pendekatan kualitatif interpretatif guna menggali pemaknaan aktor terhadap implementasi SIMAS sebagai instrumen tata kelola melalui wawancara mendalam serta pendekatan SWOT untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat.

Dengan penelitian ini, diharapkan kualitas pelayanan masyarakat melalui tata kelola masjid yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif dapat meningkat secara signifikan.

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Adapun Tahapan Penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah, mengumpulkan data awal tentang implementasi SIMAS di Kabupaten Bogor.
2. Pengumpulan Data, wawancara dengan pengurus masjid, masyarakat, dan pejabat Kemenag.
3. Analisis Data, menggunakan teori implementasi kebijakan dan mengukur indikator good governance.
4. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi: merumuskan langkah-langkah perbaikan implementasi SIMAS dan mengembangkan model implementasi yang lebih efektif.

Kerangka konseptual ini membantu mengintegrasikan tujuan penelitian dengan langkah analisis yang sistematis.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, sesuai dengan konsep Denzin (2018) dan Yin (2003), yang menekankan eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial. Creswell (2020) juga menegaskan bahwa metode ini bertujuan memahami makna yang dibangun individu dalam konteks sosial tertentu.

A. Data dan Teknik Pengumpulan

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak, termasuk pengurus masjid, pejabat KUA, serta jamaah, untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai implementasi program. Sementara itu, data sekunder mencakup dokumen kebijakan dari Kementerian Agama, laporan keuangan, serta literatur yang membahas tentang good governance. Kombinasi kedua jenis data ini memberikan

landasan yang kuat untuk analisis yang lebih mendalam dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa metode utama. Pertama, wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pengalaman terkait implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIMAS). Informan dipilih melalui teknik purposive sampling, yang menargetkan individu yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung mengenai pelaksanaan SIMAS, baik pada level kebijakan maupun operasional. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk memahami penerapan sistem di lapangan, seperti yang diungkapkan oleh Moleong (2017). Terakhir, dokumentasi digunakan untuk mendukung data empiris yang telah dikumpulkan, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan SIMAS.

B. Analisis Data

Analisis dilakukan berdasarkan metode Miles & Huberman (1994) meliputi tiga tahap utama. Pertama, proses reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi yang relevan dan menghilangkan data yang tidak diperlukan. Hal ini bertujuan agar fokus analisis tetap pada informasi yang signifikan. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi dalam bentuk narasi yang jelas atau tabel, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari data dan menghubungkannya dengan teori yang ada. Melalui tiga langkah ini, analisis dapat menghasilkan wawasan yang mendalam dan terstruktur.

C. Validasi Data

Validasi dilakukan melalui triangulasi data untuk memastikan keakuratan temuan, membandingkan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas dan tantangan implementasi SIMAS dalam kerangka good governance.

HASIL PEMBAHASAN

Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk sebesar 5.682.303 jiwa, dengan mayoritas penduduknya menganut agama Islam, mencapai 5.646.181 jiwa. Dengan kepadatan penduduk yang tinggi, infrastruktur keagamaan menjadi aspek penting dalam melayani kebutuhan spiritual masyarakat. Kabupaten ini memiliki 3.285 masjid dan 2.004

mushola, yang berfungsi sebagai pusat ibadah dan kegiatan keagamaan. Selain itu, terdapat 16.958 RT dan 4.158 RW, yang menunjukkan perlunya sistem pengelolaan keagamaan yang lebih terstruktur dan efisien.

Dalam konteks ini, penelitian tentang "Implementasi Sistem Informasi Masjid (SIMAS) oleh Kementerian Agama sebagai Instrumen Penguatan Tata Kelola yang Baik dalam Pelayanan Masyarakat di Kabupaten Bogor" menjadi sangat relevan. SIMAS diharapkan dapat membantu mengelola data masjid dan mushola secara lebih transparan, efisien, serta meningkatkan koordinasi antar-pihak terkait. Dengan sistem informasi yang terintegrasi, pengambilan keputusan dalam pengelolaan masjid dapat dilakukan dengan lebih tepat, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan. Dalam perspektif good governance, Penelitian ini menganalisis kontribusi SIMAS terhadap praktik good governance dalam pengelolaan masjid. Dengan sistem ini, informasi tentang fasilitas keagamaan dapat diakses dengan lebih mudah, memastikan bahwa kebutuhan spiritual masyarakat di seluruh unit komunitas—baik RT maupun RW—dapat terakomodasi secara optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam pentingnya penerapan teknologi dalam meningkatkan kualitas layanan keagamaan, serta memperkuat tata kelola yang baik dalam melayani kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Hasil

Sistem Informasi Masjid (SIMAS) adalah inovasi digital yang dikembangkan oleh Bidang Kemasjidan Direktorat Urusan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. SIMAS bertujuan untuk mempermudah pendataan, pengelolaan masjid, serta analisis kebijakan di bidang kemasjidan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, SIMAS memungkinkan kolaborasi yang lebih efektif antara pemerintah dan pengurus masjid dalam pengelolaan kegiatan, keuangan, dan aset masjid.

Kabupaten Bogor, dengan lebih dari 500 masjid dan mushola, menjadi lokasi yang ideal untuk mengkaji implementasi SIMAS. Penelitian ini berfokus pada tiga kecamatan: Leuwiliang, Leuwisadeng, dan Jasinga. Data dari Kementerian Agama Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa beberapa masjid di wilayah ini telah mengoptimalkan SIMAS, meskipun tingkat pemanfaatannya bervariasi.

1. Implementasi SIMAS di Kecamatan Leuwiliang

Di Kecamatan Leuwiliang, 34 masjid jami telah mengadopsi SIMAS. Masjid Al-Hikmah Cibeber dan Masjid Al-Ikhlas Leuwimekar menunjukkan pemanfaatan sistem ini dengan

baik. Pengurus masjid secara berkala memperbarui informasi terkait kegiatan, laporan keuangan, serta program sosial yang tersedia. Dengan SIMAS, pengurus lebih mudah mengajukan bantuan keuangan dan memperoleh sertifikat waqaf dalam waktu lebih singkat. Wawancara dengan pengurus masjid menunjukkan bahwa SIMAS sangat membantu dalam pengelolaan masjid. Salah satu pengurus Masjid Al-Hikmah menyatakan bahwa sebelum menggunakan SIMAS, mereka mengalami kesulitan dalam mengajukan bantuan, namun sekarang prosesnya lebih terstruktur dan transparan. Selain itu, fitur pencatatan keuangan terintegrasi dalam SIMAS meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan jamaah terhadap pengurus masjid.

Peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Leuwiliang sangat signifikan dalam implementasi SIMAS. Kepala KUA bertindak sebagai penghubung antara pemerintah dan pengurus masjid serta memberikan dukungan dan bimbingan teknis. Sosialisasi yang dilakukan oleh KUA terbukti meningkatkan tingkat penggunaan SIMAS hingga 40%. Namun, beberapa pengurus masjid merasa bahwa inisiatif Kepala KUA masih bergantung pada instruksi pemerintah dan kurang proaktif dalam membantu pengajuan bantuan.

2. Tantangan di Kecamatan Jasinga

Di Kecamatan Jasinga, tantangan yang dihadapi lebih signifikan dibandingkan dengan Leuwiliang. Salah satu kendala utama adalah ketiadaan operator SIMAS di banyak masjid, yang menyebabkan sistem ini tidak dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya, lebih dari 80% masjid di Jasinga tidak mengajukan permohonan bantuan karena kesulitan dalam menggunakan SIMAS. Pengurus masjid mengungkapkan bahwa mereka ingin memanfaatkan sistem ini, tetapi tidak memiliki keterampilan atau dukungan yang cukup. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan perekrutan individu dengan keterampilan teknologi informasi sebagai operator SIMAS. Selain itu, pelatihan intensif bagi pengurus masjid juga perlu dilakukan guna meningkatkan literasi digital mereka. Kepala KUA di Jasinga dapat berperan aktif dalam mengidentifikasi calon operator dan memberikan pelatihan yang diperlukan.

3. Peran KUA dalam Penguatan SIMAS

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan masjid juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi SIMAS. Namun, penelitian menunjukkan bahwa banyak masyarakat di Leuwiliang dan Jasinga masih kurang memahami peran KUA dalam

mendukung pengelolaan masjid. Banyak warga yang menganggap bahwa tugas KUA hanya sebatas mengurus pernikahan, sehingga mereka tidak menyadari bahwa KUA juga memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan masjid. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, KUA perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif melalui kegiatan keagamaan seperti pengajian dan seminar. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya kolaborasi antara KUA, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) dalam mengelola masjid secara efektif.

4. Partisipasi Jamaah

Keunggulan utama dari implementasi SIMAS adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan masjid. Pengurus Masjid Al-Ikhlas di Kecamatan Leuwiliang, misalnya, secara rutin memperbarui laporan keuangan yang dapat diakses oleh jamaah. Sebanyak 70% jamaah melaporkan peningkatan kepercayaan terhadap pengurus masjid setelah adanya transparansi dalam laporan keuangan. Selain itu, pengurus masjid yang menggunakan SIMAS dapat lebih mudah mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan dari pemerintah. Dengan pencatatan yang sistematis, mereka dapat menunjukkan bagaimana dana tersebut digunakan untuk rehabilitasi masjid, bantuan sanitasi, dan operasional masjid. Penelitian menunjukkan bahwa masjid yang menerapkan transparansi keuangan melalui SIMAS cenderung mendapatkan dukungan lebih besar dari masyarakat.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung implementasi SIMAS di Kabupaten Bogor meliputi: dukungan Kementerian Agama, kesadaran pengurus masjid, aksesibilitas teknologi, respon positif dari jamaah, dan adanya pelatihan teknis. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi SIMAS: keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi, resistensi terhadap perubahan, keterbatasan infrastruktur, dan inisiatif yang berbeda. Implementasi SIMAS di Kabupaten Bogor memberikan manfaat yang signifikan dalam pengelolaan masjid, terutama dalam hal transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Namun, tantangan seperti keterbatasan SDM, kurangnya sosialisasi, dan resistensi terhadap perubahan masih perlu diatasi. Dengan dukungan dari Kemenag, KUA, dan masyarakat, serta pelatihan yang lebih intensif, SIMAS memiliki potensi untuk menjadi sistem yang lebih efektif dan bermanfaat bagi pengelolaan masjid di seluruh Indonesia.

Pembahasan

Implementasi kebijakan publik adalah proses kompleks yang melibatkan banyak aktor, sumber daya, dan konteks. Teori implementasi Van Meter dan Van Horn (1975) digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Masjid (SIMAS) di Kabupaten Bogor. Fokus utama adalah enam variabel kunci yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan dalam implementasi SIMAS.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Keberhasilan SIMAS sangat bergantung pada kejelasan standar dan sasarannya, yaitu meningkatkan efisiensi pengelolaan masjid, transparansi penggunaan dana, dan akuntabilitas pengurus. Penelitian menunjukkan bahwa masjid dengan pemahaman jelas mengenai tujuan SIMAS memiliki tingkat penggunaan lebih tinggi. Contohnya, Masjid Al-Hikmah melaporkan peningkatan transparansi laporan keuangan. Namun, di Kecamatan Jasinga, beberapa pengurus mengalami kesulitan karena kurangnya pemahaman tentang sistem ini.

2. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya manusia, finansial, dan infrastruktur sangat mempengaruhi implementasi SIMAS. Pengurus masjid yang memiliki keterampilan teknologi cenderung lebih sukses dalam menerapkan sistem ini. Meskipun banyak masjid di Kabupaten Bogor memiliki akses internet, kurangnya pelatihan menghambat optimalisasi penggunaan SIMAS. Di Kecamatan Jasinga, pengurus masjid mengaku mengalami kesulitan teknis akibat minimnya pelatihan dan dukungan. Oleh karena itu, pelatihan digital dari Kementerian Agama sangat diperlukan untuk meningkatkan keterampilan pengurus masjid.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi yang efektif antara KUA, DMI, MUI, dan pengurus masjid sangat berpengaruh pada tingkat adopsi SIMAS. Sosialisasi oleh KUA di Kecamatan Leuwiliang berhasil meningkatkan penggunaan SIMAS hingga 40%. Pengurus masjid melaporkan bahwa pertemuan langsung dan pelatihan membantu mereka memahami sistem ini. Namun, beberapa pengurus mengeluhkan kurangnya komunikasi berkelanjutan dari KUA, yang menyebabkan keterasingan dan rendahnya keterlibatan mereka dalam implementasi SIMAS.

4. Karakteristik Badan Pelaksana

Sikap pengurus masjid dan KUA terhadap teknologi informasi sangat mempengaruhi

keberhasilan implementasi. Masjid Umar bin Khatab yang dikelola oleh individu yang melek teknologi berhasil mengintegrasikan SIMAS dalam operasionalnya. Sebaliknya, di Kecamatan Leuwisadeng, beberapa pengurus masjid menolak perubahan dan lebih nyaman dengan metode manual. Oleh karena itu, strategi edukasi yang lebih persuasif diperlukan untuk mengatasi resistensi terhadap teknologi.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan sosial dan ekonomi mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan masjid. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung mendukung penggunaan SIMAS. Di Kecamatan Leuwiliang, jamaah merasa lebih percaya diri memberikan masukan kepada pengurus setelah adanya transparansi dari SIMAS. Namun, di Kecamatan Jasinga, beberapa jamaah masih meragukan sistem ini karena stigma negatif terhadap teknologi. Oleh karena itu, sosialisasi intensif diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap SIMAS.

6. Sikap dan Tanggapan Pelaksana

Sikap pengurus masjid terhadap SIMAS sangat berpengaruh dalam implementasinya. Pengurus yang memahami manfaat sistem ini lebih aktif menggunakannya. Sebaliknya, mereka yang kurang percaya diri terhadap keterampilan digitalnya cenderung enggan mengadopsi sistem ini. Di Kecamatan Leuwisadeng, beberapa pengurus merasa tidak yakin dengan kemampuan mereka, sehingga partisipasi mereka dalam SIMAS rendah. Oleh karena itu, program pelatihan dan dukungan dari KUA dapat meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi pengurus masjid dalam menggunakan sistem ini.

Interaksi antarvariabel dalam teori Van Meter dan Van Horn menunjukkan bahwa kejelasan standar kebijakan mempengaruhi sikap pengurus masjid terhadap SIMAS. Jika pengurus memahami tujuan sistem ini, mereka lebih mungkin untuk mengadopsinya. Selain itu, ketersediaan sumber daya berpengaruh terhadap komunikasi antar organisasi. KUA yang memiliki sumber daya cukup dapat melakukan sosialisasi dan pelatihan dengan lebih efektif, yang pada akhirnya meningkatkan adopsi SIMAS.

Kondisi sosial dan ekonomi juga berperan dalam membentuk respons pengurus masjid terhadap kebijakan ini. Masyarakat yang memahami pentingnya transparansi cenderung mendorong pengurus masjid untuk menggunakan SIMAS. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang mendukung adopsi teknologi menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi SIMAS di Kabupaten Bogor dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Kejelasan standar kebijakan, ketersediaan sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial dan ekonomi, serta sikap pelaksana merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi SIMAS. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi, KUA dan pihak terkait perlu meningkatkan pelatihan, komunikasi, dan sosialisasi kepada pengurus masjid serta masyarakat agar SIMAS dapat dimanfaatkan secara optimal.

Implementasi Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kementerian Agama di Kabupaten Bogor berperan dalam meningkatkan good governance dan pelayanan masyarakat. Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Leuwiliang, Leuwisadeng, dan Jasinga menunjukkan bahwa SIMAS efektif dalam transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efisiensi pengelolaan sumber daya.

SIMAS meningkatkan transparansi dengan menyediakan platform pencatatan transaksi keuangan yang terbuka. Masjid yang mengadopsi sistem ini mampu menyajikan laporan keuangan lebih jelas kepada jamaah, meningkatkan kepercayaan dan mengurangi potensi penyalahgunaan dana. Misalnya, Masjid Al-Falah melaporkan bahwa SIMAS memungkinkan mereka menunjukkan sumber dan penggunaan dana secara transparan. Dalam aspek akuntabilitas, pengurus masjid dapat melacak serta mempertanggungjawabkan setiap dana yang diterima. Di Kecamatan Leuwiliang, pengurus masjid menyatakan bahwa SIMAS membantu mereka mendokumentasikan penggunaan dana untuk rehabilitasi dan program sosial, yang berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas pengurus.

Partisipasi masyarakat juga meningkat dengan SIMAS. Penelitian menunjukkan bahwa 75% jamaah di Kecamatan Leuwiliang merasa lebih percaya diri dalam memberikan masukan terkait kegiatan masjid setelah transparansi informasi ditingkatkan. Jamaah juga lebih terlibat dalam perencanaan kegiatan berbasis data SIMAS, menciptakan rasa memiliki terhadap masjid.

Efisiensi pengelolaan sumber daya masjid meningkat dengan akses data yang lebih cepat dan akurat. Pengurus dapat menentukan prioritas kegiatan berdasarkan riwayat penggunaan dana, memungkinkan fokus lebih besar pada pelayanan masyarakat seperti pengajian dan kegiatan sosial.

Dukungan dari Kementerian Agama dan KUA sangat penting dalam implementasi

SIMAS, terutama di Kecamatan Jasinga yang memiliki tingkat literasi digital rendah. Tantangan utama dalam implementasi adalah kurangnya keterampilan digital pengurus masjid, yang memerlukan pelatihan dan dukungan berkelanjutan untuk memastikan efektivitas sistem ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Masjid (SIMAS) di Kabupaten Bogor tidak hanya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan masjid, tetapi juga membuka jalan bagi transformasi digital yang lebih luas dalam komunitas. Dengan SIMAS, pengurus masjid dapat mengelola informasi dengan lebih efektif, memfasilitasi komunikasi yang lebih baik, dan membuat keputusan yang lebih tepat. Namun, variasi dalam pemanfaatan SIMAS di berbagai kecamatan menyoroti perlunya pendekatan yang lebih adaptif untuk meningkatkan efektivitasnya. Dukungan dari Kementerian Agama dan Kepala KUA sangat penting dalam meningkatkan literasi digital pengurus masjid, sementara faktor-faktor seperti kesadaran pengurus, aksesibilitas teknologi, serta pelatihan teknis berperan krusial dalam keberhasilan implementasi.

Lebih jauh, penelitian ini mengonfirmasi relevansi teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, sambil menambahkan tiga dimensi penting: keberlanjutan implementasi, monitoring dan evaluasi yang sistematis, serta inovasi dalam proses. Dengan menekankan pentingnya komitmen berkelanjutan, penyesuaian yang fleksibel, dan kemampuan untuk berinovasi, penelitian ini memperluas pemahaman kita tentang implementasi kebijakan sebagai proses yang dinamis. Secara keseluruhan, kontribusi penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan praktis untuk pengelolaan masjid, tetapi juga memperkaya kerangka teoritis yang mendasari efektivitas kebijakan publik, menjadikan SIMAS sebagai model yang patut dicontoh untuk inisiatif serupa di masa depan.

Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan implementasi SIMAS dan keberhasilan pengelolaan masjid di Kabupaten Bogor:

1. Peningkatan Pelatihan dan Sosialisasi

Disarankan agar Kementerian Agama dan Kepala KUA terus melakukan program pelatihan yang lebih intensif bagi pengurus masjid, terutama di Kecamatan Jasinga. Pelatihan ini harus mencakup aspek teknis penggunaan SIMAS serta pemahaman mengenai manfaatnya dalam pengelolaan masjid. Dengan pelatihan yang baik, pengurus masjid akan lebih percaya diri dan mampu memanfaatkan SIMAS secara optimal.

2. Rekrutmen Operator SIMAS

Untuk mengatasi masalah ketiadaan operator SIMAS di beberapa masjid, perlu dilakukan rekrutmen individu yang memiliki keterampilan di bidang teknologi informasi. Operator ini dapat bertanggung jawab dalam mengelola SIMAS, memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik, dan memberikan dukungan teknis kepada pengurus masjid.

3. Kolaborasi Antara KUA, DMI, MUI dan Pengurus Masjid

Membangun komunikasi yang lebih baik antara KUA, DMI, MUI dan pengurus masjid sangat penting. KUA perlu berperan aktif dalam memberikan informasi terkini dan dukungan yang diperlukan oleh pengurus masjid, sehingga pengurus merasa lebih terlibat dan didukung dalam proses implementasi SIMAS.

4. Sosialisasi kepada Masyarakat

Penting untuk memperluas sosialisasi mengenai peran KUA dan SIMAS kepada masyarakat. Kegiatan keagamaan, seperti pengajian atau seminar, dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang fungsi KUA dan manfaat SIMAS dalam pengelolaan masjid.

5. Meningkatkan Literasi Digital Masyarakat

Berbagai program literasi digital perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai teknologi informasi. Hal ini penting agar masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pengelolaan masjid dan mendukung transparansi yang dihasilkan oleh SIMAS.

6. Evaluasi dan Feedback

Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi SIMAS dan meminta umpan balik dari pengurus masjid serta jamaah untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk perbaikan dan pengembangan SIMAS di masa mendatang.

7. Studi Lanjutan

Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi implementasi SIMAS. Selain itu, analisis terhadap model implementasi kebijakan berbasis teknologi informasi di lembaga publik lainnya dapat memberikan wawasan tambahan untuk pengembangan SIMAS.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi SIMAS dapat berjalan lebih efektif, meningkatkan kualitas pengelolaan masjid, dan mendukung prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan masyarakat di Kabupaten Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, F. , & Y. F. (2023). Optimalisasi Fungsi Manajemen Masjid Dengan Teknologi Informasi Berbasis Web. *Jurnal Insypro (Information System And Processing)*, 8(2).
- Akib, F., Yusuf, F., Teknik, P., Uin, I., & Makassar, A. (2023). *Optimalisasi Fungsi Manajemen Masjid dengan Teknologi Informasi Berbasis Web Optimizing Mosque Management Functions with Web-Based Information Technology* (Vol. 8, Issue 2). <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/insypro>
- Al-Attas, S. M. N. (1980). *The Concept Of Education In Islam: A Framework For An Islamic Philosophy Of Education*. Muslim Youth Movement Of Malaysia (Abim).
- Creswell, J. (2020). *Desain Penelitian: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran (Edisi Ke-4)*. Ca: Publikasi Sage.
- Denzin, N. K. (2018). *The Qualitative Manifesto*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429449987>
- Dewi, R. S. (2019). Pemberdayaan Masjid Di Indonesia Dalam Perspektif Institutional Building. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(1), 7–16.
- Fernando, R. , H. T. , & R. K. K. (2022). Professional Mosque Management Model Based On Religious And Academic Activities In The Community. *Khalifa: Journal Of Islamic Education*, 6(2).
- Himmah, E. F. , & A. N. A. (2024). Optimalisasi Simas (Sistem Informasi Masjid) Oleh Seksi Bimas Islam Dalam Meningkatkan Efektivitas Pendataan Masjid Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang. . *Maddah: Journal Of Advanced Da'wah Management Research*, 3(1), 63–72.
- Hodgson, M. G. S. (1974). *The Venture Of Islam: Conscience And History In A World Civilization*. The University Of Chicago Press.
- Imani, I. N. , & F. A. (2023). Manajemen Masjid Berbasis Keterlibatan Masyarakat Lintas Etnis Pada Komunitas Tionghoa. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 22(2), 169–

186.

- Karimah, H. , & B. A. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Manajemen Keuangan Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi. *Jiai (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 7(1), 1–13.
- Maruapey, M. H., Rusli, B., Karlina, N., & Rahmatunnissa, M. (2018). Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri di Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 6(1), 68–75.
- Meter, V. , & H. V. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration & Society* (4th ed., Vol. 6).
- Miles, M. B. , & H. A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications.
- Mulyani, S. , & R. F. (2024). Resepsi Pengurus Badan Kemakmuran Masjid (Bkm) Pada Sistem Informasi Masjid (Simas) Kemenag Di Medan Barat. . *Jurnal Social Library*, 4(3), 420–429.
- Mustofa. (2024). Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Masjid : (Studi Pada Masjid Baitul Mukminin Gedangan Sidoarjo). *Jurnal Al-Buhuts*, 16(1), 33–56.
- Nasihin, M. Z., Luthfie, M., & Rusliandy. (2020). Implemntasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi. *Administratie: Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 2715–2499.
- Nasr, S. H. (2001). *ISLAM Religion, History, and Civilization*.
- Putra, I. R., & Murtini, S. (2024). Pengelolaan Keuangan Dan Penerapan Pengendalian Internal Pada Kegiatan Isra Mi'raj Di Masjid Baiturrahman. *Dharmas Education Journal (De_Journal)*, 4(3), 824–832.
- Rahmawati, R., Hernawan, D., Sektiono, D., & Darusman, D. (2019). Kinerja Implementasi Tata Kelola Hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. *Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 21(3), 305–315.
- Ramadhani, P. (2022). *Analisis Implementasi Tata Kelola Wakaf Produktif Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah (Studi Pada Ihmal Market)*. Uin Ar-Raniry.
- Satria, D. (2016). Fungsi Sosial Masjid Pada Masa Rasulullah Saw: Kajian Historis. *Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat*, 12(2), 35–46.
- Wisudya, R. Y., Imam, S., & Wijaya, F. W. (2025). Sistem Informasi Pengelolaan Masjid Jami'al-Khoir Berbasis Web. *Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi (Sintek)*, 5(1), 32–40.

Yousif, A. F. (2006). *The Role Of The Mosque In Building A Civil Society*. International Institute Of Islamic Thought And Civilization (Istac).